

Bulan :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

|              |            |
|--------------|------------|
| Media Online |            |
| Media Cetak  | Warta Kota |

## Rumuskan Penyesuaian Gaji PJLP Setara UMP 2023

Pemerintah DKI Jakarta masih merumuskan rencana penyesuaian gaji penyedia jasa dan lainnya perorangan (PJLP) dengan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023.

Diketahui, gaji PJLP di satuan perangkat kerja daerah (SKPD) hingga unit kerja daerah (UKD) sebesar Rp 4,6 juta per bulan, sedangkan UMP yang ditetapkan mencapai Rp 4,9 juta.

"Sedang kami rumuskan," ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono kepada wartawan, Minggu (14/5/2023).

Joko mengingatkan, bahwa jumlah PJLP di Ibu Kota sangat banyak mencapai 132.000 orang. Mereka bertugas membantu kinerja pegawai negeri sipil (PNS) dalam melayani masyarakat di Jakarta.

"Proses pengadannya itu kan pengadaan jasa, itu bukan gaji namanya, pembayaran jasa. Beda, jadi harus dibedakan," katanya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Giblya mengatakan, gaji PJLP tidak mengikuti UMP karena penetapan UMP dilakukan setelah pemerintah daerah menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2023.

Penetapan UMP dilakukan pada bulan November 2022, sedangkan penyusunan APBD sudah dilakukan pertengahan tahun 2022 atau lebih awal beberapa bulan.

"Kan proses perubahan UMP dari Rp 4,6 juta jadi Rp

4,9 juta kan itu sudah ditetapkan, sedangkan penetapan anggaran tahun 2023 itu kan sudah dibahas di tahun 2022," katanya.

Maria belum bisa memastikan selisih Rp 300.000 gaji PJLP setiap bulan itu apakah dirapel di kemudian hari atau tidak. Soalnya rencana penyesuaian gaji PJLP masih dibahas oleh Pemerintah DKI Jakarta.

"Itu kami tunggu, kan itu anggaran nanti kami lihat ketersediaan anggaran, kan ada mekanisme perubahan (APBD-Perubahan 2023), pergeseran dan ada timnya (Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD)," jelas Maria.

Sebelumnya Rizal (36) anggota PJLP DKI Jakarta bercerita soal gajinya yang belum sesuai dengan UMP ibu kota.

Ia yang saat ini bekerja sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), mengaku upahnya belum naik sesuai dengan UMP 2023.

"Iya memang (belum naik)," ujar dia saat ditemui di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (11/5/2023).

Rizal merasa kekurangan dengan gajinya saat ini, mengingat banyak kebutuhan untuk keluarga yang harganya makin naik dan untuk ongkos kerjanya setiap hari. Apalagi, Rizal juga harus membayar iuran BPJS setiap bulannya sendiri tanpa ditanggung pihak kelurahan.

"Apalagi BPJS kami itu bayar sendiri ya sekarang. Tadinya ditanggung dari kantor, sekarang BPJS kami bayar sendiri," ucap dia. (faf)



dak